

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Peraturan Menteri No. 24 Pasal 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Surat Keterangan Bupati Sleman No. 261/Kep.KDH/A/2012 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Buku

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi UU*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahtiar, Rais Agil. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No.10.
- Bromley, Ray. (1979). *Introduction The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing? The Urban Informal Sector: Critical Perspective on Employment and Housing Policies*. Oxford: Pergamon Press.
- DPMPTSP, 2021, *Buku Panduan Penggunaan OSS RBA*, DPMPTSP Sleman, Sleman.
- Firdausy, C.M. (1995). *Modal dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Friedrich, Carl Joachim. (2004). *Filsafat hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hadjon, Philipus M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hyronimus, Rheti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), cet. Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Laena, Idris. (2010). *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengmembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Jakarta: Lugas Foundation.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- OECD. (2005). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook*. Paris: OECD.
- Prajudi, Atmosoedirjo (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pudyatmoko, Sri.Y. (2009). *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwan, Juniarso. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Bahan Ajar Hukum Perizinan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sutedi, Adrian. (2017). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Karya Tulis Ilmiah

- Adam, Wahiduddin, (2006), *Prioritas Legislatif Daerah*, Disampaikan pada acara Panel Forum Nasional Program Legislatif Daerah 2006-2009 diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta.
- Christiawan, Rio. (2021). *Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, No.1.
- Hanafi Muhammad fikri dan Ummul sunny, 2022, *Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundnag-undangan di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No. 1.
- Lestaringtyas, Twotik dan Muhammad Roqib. (2021). *Perlindungan data pribadi pengguna sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)*. Jurnal Jendela Hukum, 8(2). ISSN cetak & online: 2355-5831/2355-9934.
- Marlinah, L. (2020). *Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No. 2.
- Maulana, Rifqy. (2018). *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 1.

- Primadhita, Y dan S. Budiningsih. (2020). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression*. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1).
- Saragih, Suend.R.H. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang Diberikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. (Skripsi, Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan).
- Siregar, Nur Fitriyani. (2018). *Efektifitas Hukum*. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2).
- Tarina, Arum. (2020). *Urgensi Izin Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil*. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2).
- Wibowo, Rifqi Ihsanuddin. (2021). *Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Masalah*. (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Internet

- Adam Wahid, (2021), *Peta Permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah*, djpp.go.id, diakses pada tanggal 24 Desember 2022, dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=323:peta-permasalahan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah-dan-upaya-fasilitasi-perancangan-perda&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=18,
- Admin, (2015), *Pengertian Produk Hukum Daerah*, Hukumsetda, diakses pada 24 Desember 2022, dari <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). *Kuliner*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring*. Diakses pada 9 Agustus 2022, dari <https://kbbi.web.id/kuliner>.
- Dinas DPMPSTSP Bantul. (2021). *Pemilik izin OSS versi 1.0 harus melengkapi data di OSS versi 1.1*. Diakses pada 9 Maret 2022, dari <https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/380-pemilik-izin-oss-versi-1-0-harus-melengkapi-data-di-oss-versi-1-1>.
- Dinas DPMPSTSP Sukabumi. (2021). *Mengenal OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)*. Diakses pada 9 Maret 2022, dari <https://dpmptsp.sukabumikota.go.id/mengenal-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/>.

- Dinas Koperasi dan UMKM. (2022). *Satu Data UMKM*. Diakses pada 14 April 2022, dari <https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal>.
- Dinas PMPTS. (2021). *Catat ini perbedaan sistem OSS versi 1.0 dan OSS versi 1.1*. Diakses pada 9 Maret 2022, dari <https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/187/catat-ini-perbedaan-sistem-oss-versi-10-dan-oss-versi-11.html>.
- Kemenkeu RI. (2021). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Diakses pada 9 Agustus 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2020). *Kategori Pelaku Usaha*. Diakses pada 20 November 2022, dari <https://oss.go.id/>.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Panduan OSS*. Diakses pada 9 Maret 2022, dari <https://oss.go.id/panduan>.
- Miqdad, Robbani Muhammad. (2022). *Layanan PLUT untuk UMKM*. Diakses pada 27 September 2022, dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/layanan-plut-untuk-umkm/#:~:text=Berdasarkan%20peraturan%20tersebut%2C%20Pusat%20Layanan,bagi%20pengembangan%20usaha%20Koperasi%20dan>.

Hasil Wawancara

- Brewok. (2022). *Penerapan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM*. Ketua Perkumpulan PKL di Jalan Persatuan UGM. Depok, Sleman.
- Bondan. (2022). *Aturan terkait PKL yang berjualan di pinggir jalan*. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kab Sleman.
- Dimi. (2022). *Data kepemilikan NIB bagi UMKM*. Seksi Monitoring Pelaporan dan Data, Dinas Koperasi dan UMKM, Kab Sleman.
- Dharmanto. (2022). *PKL yang berjualan di pinggir jalan*. Kepala Bidang Penertiban dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kab Sleman.
- Edy. (2022). *Izin PKL yang berjualan di Jalan Persatuan UGM*. Sekretaris Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Eddy. (2022). *Kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM*. Seksi Kelembagaan KUKM, Dinas Koperasi dan UMKM, Kab Sleman.
- Friza. (2022). *Lokasi dan Perizinan PKL*. Sub Koordinator Penataan Tradisional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab Sleman.

Iwan. (2022). *Kepemilikan NIB bagi PKL*. Staf Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab Sleman.

Sudewo. (2022). *Data PKL yang telah memiliki izin lokasi usaha dan NIB*. Bagian 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab Sleman.

Titi. (2022). *Penggunaan sistem OSS RBA*. Staf Bidang Perizinan OSS RBA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab Sleman.